ANALISIS KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN – TUNTUTAN GANTI RUGI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Negara



Diajukan Oleh : Rahmatullah Ramadhan 07011381419173

Konsentrasi Keuangan

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SRIWJAYA 2018

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS KEEFEKTIFAN PENYERAPAN ANGGARAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN – TUNTUTAN GANTI RUGI DI BADAN PENGELOLAAN KEAUNGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016

SKRIPSI

Oleh:

Rahmatullah Ramadhan 07011381419173

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing, November 2018

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si NIP.196612301992032001

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si NIP.196211251989121001 my

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Analisis Keefektifan Penyerapan Anggaran Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2016" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 11 Januari 2019.

Palembang, 11 Januari 2019

Ketua

Dr. Lili Erina, M.Si NIP.196612301992032001

Anggota

Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001

Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si NIP. 196511171990031004

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA NIP. 198108272009121002

Mengetahui:

Dekan FISIP

Prof. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si NIP. 196311061990031001 Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Zailani Surya Marpaung, S.Sos,MPA NIP. 198108272009121002

MOTTO:

"You Don't Need Anybody To Tell You Who You Are Or What You Are. You Are What You Are"

"Anda Tidak Perlu Orang Lain Mengatakan Kepada Anda Siapa Diri Anda Dan Apakah Diri Anda. Anda Adalah Diri Anda"

(John Lennon)

Skripsi ini,

Kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku (Ferryadi Asri Munandar dan Mardiana)

Kedua Adikku (Muhammad Waladun Salis dan Akbar Kurnia Illahi)

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul "ANALISIS SISTEM PENYERAPAN ANGGARAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN – TUNTUTAN GANTI RUGI DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016". Sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

- Kedua orangtuaku Ayahanda Ferryadi Asri Munandar dan Ibunda Mardiana serta Adikku Muhammad Waladun Salis dan Akbar Kurnia Illahi yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam proses perkuliahan.
- 2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, sebagai Rektor Universitas Sriwijaya
- 3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan 1, Bapak Sofyan Effendi, M.si selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku wakil Dekan III di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- 4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos. MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrassi Negara
- 5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
- 6. Ibu Dr. Lili Erina, M. Si selaku pembimbing I yang telah sabar dan mengayomi untuk membimbing, memberikan nasihat, dan memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
- 7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku pembimbing II yang selalu dapat memberi support dalam penulisan skripsi ini.
- 8. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberi ilmu yang bermanfaat.
- 9. Seluruh Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selalu ramah dan tidak pernah lelah membantu dalam persoalan administrasi

10. Mbak Cherly dan Kak Arya yang telah membantu menjelaskan tentang TP – TGR.

11. Seluruh pegawai di bidang Akuntansi karena telah dapat menjadi rekan dan teman

selama penulisan skripsi ini

13. Adikku tercinta yang telah memberi dukungan dan doa tanpa henti

14. Sahabatku, TEKACAR dan GSM Terimakasih telah menghibur selama penulisan

skripsi ini

15. Seluruh teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Kampus Palembang angkatan

2014. Terimakasih banyak atas seluruh kenangan manis yang sudah dibuat

bersama-sama selama tiga tahun di masa perkuliahan. Kenangan yang saya sadar sulit

untuk melupakannya. Yang akan membuat saya selalu merindukan masa-masa

perkuliahan ini.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan selalu dilancarkan

dalam segala urusan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, instansi

terkait, dan bagi para pembaca.

Palembang, November 2018

Penulis

Rahmatullah Ramadhan

NIM. 07011381419173

vi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan - tuntutan ganti rugi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang tahun 2016. Salah satunya kasus Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi, tetapi dalam menyelesaikannya masih banyak yang belum tahu sosialisasi, sehingga tidak efektifnya anggaran Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi tersebut, Penelitian tentang Analisis Keefektifan Penyerapan Anggaran Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2016 berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana keefektifan penyerapan anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang. Keefektifan Penyerapan Anggaran Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi ini diuraikan melalui teori efektivitas Steers, vaitu masukan, pengolahan, dan keluaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. yaitu mendeskripsikan secara terperinci keefektifan penyerapan anggaran Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi dan menganalisa data - data serta berbagai informasi yang diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai keefektifan penyerapan anggaran Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, serta studi pustakaan berupa undang - undang, peraturan - peraturan, dan dokumen dokumen lain yang berkaitan. Keefektifan penyerapan anggaran Tuntutan Perbendaharaan -Tuntutan Ganti Rugi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palembang cukup efektif, karena tidak mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukan bahwa pegawai pemerintah di kota Palembang masih kurang menyadari pentingnya kasus Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi. Oleh sebab itu, Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di kota Palembang lebih sering mengadakan sosialisasi tentang kasus Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi dan menghimbau agar pegawai pemerintah kota Palembang yang terkena kasus ini wajib dalam menyelesaikannya sampai tuntas.

Kata kunci: analisis, efektivitas, penyerapan, anggaran, penyelesaian, dan kerugian.

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001

Palembang, Januari 2019 Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the effectiveness of the absorption of treasury demand budgets - compensation claims at the Regional Financial and Asset Management Agency of Palembang in 2016, One of them is the case of Treasury Demands - Compensation Claims, but there are still many who do not know about socialization, so ineffective budget of Treasury Demands - Claims for Compensation. The research on the Analysis of the Effectiveness of Budgetary Absorption of Treasury Demands - Claims of Compensation at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Palembang in 2016 sought to describe and explain the effectiveness of budget absorption in the Regional Financial and Asset Management Agency in Palembang. The Effectiveness of Treasury Demand Budget Absorption - Compensation Claims is described through the theory of Steers effectiveness, namely input, processing, and output. The method used in this study is qualitative, which describes in detail the effectiveness of the absorption of the Treasury Claims - Compensation Claims and analyzes the data and various information obtained with the aim of obtaining an overview of the effectiveness of budgetary repayment demands - Claims for Compensation. Data collection is carried out through interviews, observation, and library studies in the form of laws, regulations, and other related documents. The effectiveness of the budget absorption of the Treasury Demands - Compensation Claims carried out by the Regional Financial and Asset Management Agency of the city of Palembang is quite effective, because it does not reach the predetermined target. This shows that government employees in the city of Palembang are still less aware of the importance of the case of Treasury Demands - Claims for Compensation. Therefore, the Department of Regional Financial and Asset Management Agency in Palembang more often held a socialization about the case of Treasury Claims - Compensation Claims and appealed to the Palembang city government officials who were affected by this case must complete it thoroughly.

Keywords: analysis, effectiveness, absorption, budget, settlement and loss.

Advisor I

Dr. Lili Erina, M.Si

NIP. 196612301992032001

Advisor II

Drs. Mardianto, M.Si NIP. 196211251989121001

Palembang, January 2019 Chairman of The State Administration Science Departmen Faculty of Social Science and Political Science Sriwijaya University

> Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	
ABSTRAK	
ABSTACK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR SINGKATAN	
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori 1. Analisis 2. Keefektifan/Efektivitas 3. Anggaran 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah B. Teori Efektivitas yang digunakan C. Penelitian Terdahulu D. Kerangka Pemikiran	
BAB III METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian B. Definisi konsep C. Fokus Penelitian D. Unit Analisis Data E. Informan Penelitian F. Data dan Sumber Data G. Teknik Pengumpulan Data H. Teknik Analisis Data	
I. Sistemika Penulisan	33

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Sejarah BPKAD kota Palembang	36
C. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan	
D. Tugas Pokok dan Fungsi	45
E. Struktur Organisasi	
F. Hasil dan Pembahasan	70
1. Masukan	71
2. Pengolahan/Proses	76
3. Keluaran	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	halaman	
Tabel 1.1	3	
Tabel 2.2	2	2
Tabel 3.1	3	0
Tabel 4.1	4	0
Tabel 4.2	4	3
Tabel 4.4	7	3
Tabel 4.5	7	5
Tabel 4.8	7	9
Tabel 4.9	8	0

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	14
Gambar 2.3	25
Gambar 4.3	69
Gambar 4.6	77
Gambar 4.7	78
Gambar 5.0	82
Gambar 5.1	84
Gambar 5.2	85
Gambar 5.3	87

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan

1. BPKAD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. TP-TGR : Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi

3. MP TP-TGR : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi

4. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efesien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 3 menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah salah satunya penyelesaian kerugian daerah, bahwa keharusan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelesaikan kerugian daerah. Maka dari itu penting sekali adanya Pengelolaan keuangan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait kerugian daerah. Sebagaimana amanat pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara". Undang-Undang yang dimaksud di sini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) "Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan". Dan pasal 63 ayat (1) "Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota; dan ayat (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah".

Pada Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh

menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Dalam arti bahwa untuk pemerintah provinsi ditetapkan oleh gubernur dan untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.Dan pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara akan diatur dengan peraturan pemerintah, yang sampai dengan tulisan ini dirilis Peraturan Pemerintah dimaksud belum ditetapkan dan masih dalam bentuk rancangan.

Di dalam pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Dari ketentuan pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005, Penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Majelis Pertimbangan – Tuntutan Ganti Rugi dengan proses persidangan umum, Pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan – Tuntutan Ganti Rugi layaknya proses persidangan peradilan umum ini, didasarkan pada lembaga peradilan umum, Pemerintah kota Palembang telah memperbaiki Peraturan Walikota Palembang Nomor 147 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang "Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota" yang sebelumnya juga diubah pada Peraturan Walikota Palembang 08.a / KPTS / BPKAD / 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 146 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penindak / Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara yang sebelumnya juga diubah pada Peraturan Walikota Palembang 531.a / KPTS / BPKAD / 2016.

Di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pun menetapkan kegiatan yang terdapat dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan berbagai kegiatan salah satunya realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaan –

Tuntutan Ganti Rugi,. Berikut adalah tabel anggaran kegiatan yang dilakukan dalam program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah :

Tabel 1.1

Target dan Realisasi TP-TGR

TAHUN ANGGARAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
2014	106.588.345.00,-	97.219.771.00,-
2015	143.945.375.00,-	151.955.372.00,-
2016	115.495.720.00,-	99.433.675.00,-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang

Berdasarkan Tabel 1.1, pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, "ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang mengenai perbendaharaan negara". Pada tahun 2014 realisasi Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi mencapai target sebesar Rp 147.323.511, kemudian tahun 2015 realisasi Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi kota Palembang mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 139.649.226, dan pada tahun 2016 juga tidak mencapai target yang telah di tentukan sebesar Rp 153.868.343. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya keefektifan dari program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena masih banyak sekali jumlah Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi yang belum terealisasi.

Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau

pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Timbulnya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dapat dikarenakan kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan, atau ketidaksenggajaan, maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah.

Karena permasalahan yang telah diuraikan, maka dari itu pentingnya diadakan penyelesaian daerah yang efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam kerugian daerah terkait Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan ganti Rugi agar target yang telah ditetapkan dapat mencapai target.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

Mengapa keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di
badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Palembang tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Palembang tahun 2016.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui Bagaimana pelaksanaan keefektifan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dari sini, diharapkan. Akan dapat ditemukan suatu konsep pelaksanaan yang baik atas penyelesaian kerugian daerah yang dijalankan, khususnya

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi yang di setujui untuk diberikan kepada aset daerah yang tidak merugikan aset daerah dan sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan.

Manfaat praktisnya adalah masukan berupa informasi dari pihak independen kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan masukan ini, pihat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mengetahui dan sadar akan perlunya Analisis keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Palembang tersebut. Ini merupakan langkah awal yang baru bagi pihak tersebut untuk mengambil kebijakan dan memperbaiki sistem agar lebih baik lagi untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Halim 2004. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta. UPP YKPN.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siagian P. Siagian. 2004. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Steers, Richard. 1980. Efektifitas Organisasi. Jakarta: Erlangga.

Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Media Pressindo

INTERNET

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html di akses tanggal 4/4/2018 Pukul 4.16

https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/penyelesaian-kerugian-negaradaerah-melalui-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi/ di akses tanggal 4/23/2018 pukul 9.13

http://www.spengetahuan.com/2017/11/pengertian-analisis-sistem-menurut-para-ahli.html di akses tanggal 4/24/2018 pukul 11.27

http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-anggaran-menurut-definisi.html di akses tanggal 4/24/2018 pukul 14.55

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli/ di akses tanggal 4/24/2018 pukul 17.02

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view
&typ=html&buku_id=83028&obyek_id=4 di akses tanggal 4/24/2018 pukul 21.59

http://www.sumberpengertian.co/pengertian-hipotesis-secara-umum-dan-menurut-para-ahli di akses tanggal 4/25/2018 pukul 00.25

PERATURAN PERATURAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Nomor 147 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota.

Peraturan Walikota Nomor 146 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penindak / Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara.